



---

## Perbandingan Historis Sistem Pendidikan Kolonial Belanda dan Pendidikan Indonesia Masa Kini

Madyan<sup>1</sup>, Nada<sup>2</sup>, Fitri<sup>3</sup>, Mery<sup>4</sup>, Fahria<sup>5</sup>

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [ianmadyan@gmail.com](mailto:ianmadyan@gmail.com), [syafirana60@gmail.com](mailto:syafirana60@gmail.com),  
[fitrilestarijambi@gmail.com](mailto:fitrilestarijambi@gmail.com), [meryarizki128@gmail.com](mailto:meryarizki128@gmail.com), [fahriasaja8888@gmail.com](mailto:fahriasaja8888@gmail.com)

---

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 05 September 2025,  
Article Accepted: 20 September 2025, Article published: 01 Oktober 2025

---

### ABSTRACT

Education in Indonesia has undergone a significant transformation from the Dutch colonial era to the modern period. During colonial times, the education system was discriminatory and accessible only to the nobility and European children, thereby widening social inequality. In contrast, contemporary Indonesian education seeks to promote equality, compulsory schooling, and the development of students' potential. This study aims to examine the historical and conceptual differences between the Dutch colonial education system and Indonesia's current education system. The method employed is a literature review by analyzing history books, academic journals, and educational documents. The findings indicate that colonial education primarily served Dutch political and economic interests, while Indonesia's national education emphasizes inclusiveness, democratization, and learning quality. The implication of this study highlights the importance of learning from history to strengthen national education policies that are more adaptive, equitable, and globally competitive.

**Keywords:** Colonial Education, Indonesian Education, Transformation

### ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari masa kolonial Belanda hingga era modern saat ini. Pada masa kolonial, sistem pendidikan bersifat diskriminatif karena hanya terbatas pada kalangan bangsawan dan anak-anak Eropa, sehingga memperlebar kesenjangan sosial. Sebaliknya, pendidikan Indonesia kontemporer berupaya mewujudkan asas kesetaraan, wajib belajar, dan pengembangan potensi peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan historis dan konseptual antara sistem pendidikan kolonial Belanda dengan sistem pendidikan Indonesia saat ini. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menelaah berbagai buku sejarah, jurnal akademik, dan dokumen pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kolonial lebih menekankan kepentingan politik dan ekonomi Belanda, sedangkan pendidikan nasional Indonesia menekankan inklusivitas, demokratisasi, dan kualitas pembelajaran. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pembelajaran dari sejarah untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional yang lebih adaptif, merata, dan berdaya saing global.

**Kata Kunci:** Pendidikan Kolonial, Pendidikan Indonesia, Transformasi

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, identitas bangsa, dan daya saing global. Dalam sejarah panjang Indonesia, sistem pendidikan telah melalui proses transformasi yang signifikan, mulai dari masa kolonial Belanda hingga era kemerdekaan dan era kontemporer saat ini. Pada masa kolonial, pendidikan tidak diarahkan untuk memberdayakan rakyat pribumi, melainkan menjadi instrumen kolonial dalam mencetak tenaga kerja terampil yang loyal kepada pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan saat itu lebih menekankan stratifikasi sosial, di mana akses sekolah terbatas hanya pada kalangan priyayi dan anak-anak Eropa, sedangkan masyarakat biasa sebagian besar terpinggirkan dari sistem formal (Federspiel, 2021).

Sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif ini melahirkan ketimpangan sosial dan intelektual yang mengakar dalam masyarakat. Model pendidikan yang diciptakan lebih menekankan pada pelestarian struktur kolonial, ketimbang memberikan kesempatan merata bagi seluruh anak bangsa. Sebaliknya, pendidikan di era Indonesia modern lebih menekankan pada prinsip inklusivitas, kesetaraan kesempatan, dan pengembangan potensi individu tanpa memandang status sosial. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusi dan kebijakan wajib belajar, yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (Tilaar & Nugroho, 2020). Namun demikian, sistem pendidikan nasional masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan akses, kualitas, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman.

Dalam perspektif global, transformasi pendidikan di negara-negara pascakolonial sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya. UNESCO (2022) menegaskan bahwa pendidikan inklusif dan berkualitas merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara, serta menjadi syarat utama bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan kondisi geografis yang kompleks, menghadapi tantangan ganda dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses pendidikan yang setara. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan, masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi melalui kebijakan strategis.

Selain itu, dinamika globalisasi dan revolusi industri 4.0 turut memengaruhi arah pendidikan nasional. Pendidikan tidak hanya dituntut mencetak lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga adaptif, inovatif, dan memiliki keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kemampuan kolaboratif (Schwab, 2017; Zhao, 2021). Hal ini menjadikan sistem pendidikan Indonesia harus terus beradaptasi agar relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar kerja global. Dengan demikian, perbandingan antara sistem pendidikan kolonial Belanda dengan sistem pendidikan modern di Indonesia penting untuk ditelaah dalam kerangka historis sekaligus prospektif.

Kajian historis terhadap sistem pendidikan kolonial menunjukkan bahwa pendidikan kala itu lebih menekankan kepentingan kolonial daripada pembangunan masyarakat. Sebaliknya, sistem pendidikan modern di Indonesia

dibangun atas dasar nasionalisme, demokratisasi, dan pemerataan akses. Namun, kendala yang dihadapi tidak dapat dipandang ringan, karena persoalan kualitas guru, relevansi kurikulum, dan rendahnya literasi siswa masih menjadi isu yang belum terselesaikan (OECD, 2019). Dengan memahami perbedaan historis ini, dapat dirumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perbedaan antara sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif historis sekaligus analitis yang dapat memperkaya wacana tentang kebijakan pendidikan nasional serta arah pembangunannya di masa depan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan menelaah berbagai sumber sekunder berupa buku sejarah, artikel jurnal akademik, serta dokumen pendidikan yang relevan. Kajian pustaka dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda dan pendidikan di Indonesia saat ini tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan. Proses analisis dilakukan melalui tahap identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur, sehingga menghasilkan pemahaman historis yang sistematis dan mendalam tentang dinamika transformasi pendidikan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa landasan konseptual yang kuat untuk mendukung pembahasan arah kebijakan pendidikan nasional di masa depan (Snyder, 2019; Torracco, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Sistem Pendidikan zaman Belanda*

Masuknya Belanda ke Indonesia untuk membentuk daerah penguasaan (koloni) serta mencakup kepentingan ekonomi dan politik. Pada awal abad 20, pemerintah Belanda mulai memperkenalkan sistem Pendidikan Barat untuk penduduk pribumi. Konsep pendidikan barat tersebut dapat lebih memenuhi kebutuhan untuk mengisi lowongan kerja dalam administrasi modern dengan gaji dan hasil yang lebih baik, maka tipe-tipe sekolah seperti ini menarik banyak murid terutama anak priyayi dan bangsawan pribumi. Sistem pendidikan Barat yang masuk menjadikan pendidikan sebagai tempat latihan bagi anak para bangsawan untuk kemudian menjadi kepanjangan dari kekuasaan pemerintahan colonial Belanda (Salim, 2007:199).

Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan kaum penjajah. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite-sosial (penjilat penjajah) Belanda. Dasar pendidikannya adalah dasar pendidikan Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat. Bermula dari prinsip inilah pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan diutamakan pada anak-

---

anak bangsawan bumi putera serta tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai kolonial yang diharapkan kelak mereka akan menjadi penyambung tangan-tangan penjajah sebagai upaya Belanda untuk memerintah secara tidak langsung kepada masyarakat dan bangsa Indonesia (Ary, 1995:111).

Pada saat penjajahan Belanda, satu sisi terdapat institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hanya 6% saja penduduk pribumi dapat bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda dan mereka berasal dari kalangan priyayi. Di sisi lain terdapat institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pesantren dan Madrasah). Bagi masyarakat non-priyayi, mereka mendapatkan pendidikan di pesantren dan madrasah. Karena tekanan politik pemerintah Hindia Belanda, sekolah Islam dan madrasah berada pada kotak dan kubu sendiri. Masing-masing institusi pendidikan tersebut mempunyai sistem pendidikan yang secara diametral berbeda dan dikotomik. A. Murni Kawakib dalam bukunya *Pesantren and Globalization* (Kawakib, A. Munir, 2009: 3-4).

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda itu awalnya hanya terbatas sampai tingkat rendah. Namun, pada awal abad ke-20, mulai dibuka sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi pada tahun 1920-an. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda ini telah mendorong beberapa tokoh/golongan terpelajar untuk berusaha memajukan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, masih terdapat diskriminasi dalam pelaksanaannya, di samping sifat-sifat lembaga pendidikannya yang terlalu elite. Inilah yang menyebabkan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia berjalan dengan sangat lambat.

Ciri-ciri kebijakan pendidikan Hindia Belanda, yaitu: (1) Gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia; (2) Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan Pendidikan pribumi; (3) Kontrol sentral yang ketat; (4) Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan; (5) Prinsip konkordansi yang menyebabkan maka sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda; (6) Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan pribumi (Nasution, 1994:20).

Dalam tahun 1893 ditetapkan sekolah untuk anak-anak pribumi terdiri atas dua bagian yakni sekolah kelas satu untuk anak-anak dari keluarga bangsawan dan berada, dan sekolah kelas dua untuk anak-anak dari masyarakat biasa. Baik pada sekolah kelas satu maupun pada sekolah kelas dua bahasa Belanda tidak dianjurkan. Umumnya lama belajar lima tahun untuk sekolah kelas satu, dan dua tahun untuk sekolah kelas dua. Tujuan utama dari sekolah kelas dua adalah melengkapi keperluan pendidikan rakyat di pedesaan.

Pendidikan kolonial Belanda terdiri dari tiga jenjang pendidikan, yaitu (1) Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*) yang dibagi menjadi dua yaitu Sekolah Rendah Berbahasa Pengantar Bahasa Belanda, contohnya Sekolah Rendah Eropa/*Lagere School* (ELS), Sekolah Cina Belanda/*Hollandsche Chinese School* (HCS),

dan Sekolah Bumiputera Belanda/*Hollandsche Inlandsche School* dan Sekolah Rendah Berbahasa Pengantar Bahasa daerah atau Melayu, contohnya Sekolah Bumiputera Kelas Dua (*Inlandsche School-Tweede Klasse*), Sekolah Desa (*Volkschool*), dan Sekolah Peralihan (*Vervolgschool*); (2) Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*), contohnya MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), AMS (*Algemene Middlebare School*), dan Sekolah Tinggi Warga Negara/ *Hogere Burger School* (HBS); (3) Pendidikan Tinggi, contohnya Sekolah Tinggi Kedokteran/ *Geneskundige Hoge School* (GHS), Sekolah Tinggi Hukum/ *Rechts Hoge School* (RHS), dan Sekolah Tinggi Teknik/ *Technische Hoge School* (THS).

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Indonesia khususnya Jawa tampak jelas adanya perlakuan yang berbeda, baik itu bagi anak-anak Eropa, Cina, maupun bagi pribumi sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan dibedakannya kesempatan untuk memasuki sekolah bagi golongan atas (bangsawan) dan bagi golongan bawah (rakyat biasa). Untuk memasuki sekolah tertentu masih dipersulit dengan aturan-aturan yang memberatkan, ditambah lagi dengan biaya yang sangat mahal. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menghalangi rakyat biasa memasuki sekolah yang khusus untuk anak-anak Eropa, sehingga bagi rakyat Bumiputera terutama bagi rakyat biasa hanya bisa menduduki sekolah pada tingkat rendah saja. Adapun bagi golongan atas atau bangsawan dapat terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sampai perguruan tinggi.

Sistem persekolahan pada jaman kolonial Belanda abad ke-20 terdiri atas tiga jenjang pendidikan, yaitu (1) pendidikan rendah (*Lagere Onderwijs*), yang dibagi menjadi 2, yaitu Sekolah Eropa dan Sekolah Bumiputra, (2) pendidikan lanjutan atau menengah (*Middlebaar Onderwijs*), (3) pendidikan tinggi (*Hooger Onderwijs*).

### ***Sistem Pendidikan Di Indonesia Zaman Modern***

Pada saat ini, pendidikan di Indonesia memiliki peringkat yang masih terbelakang rendah dibandingkan dengan negara lain dalam aspek sistem pendidikan. Ada beberapa penyebab pendidikan di Indonesia masih rendah dibanding dengan negara-negara lainnya. Salah satunya yaitu pengaruh kurangnya literasi atau minat baca pada siswa maupun mahasiswa serta kemampuan dalam berpikir kritis (*critical thinking*) yang masih rendah.

Adapun Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dalam dunia Pendidikan khususnya di sekolah yang ada di Indonesia ini adalah rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran kegiatan membaca yang ada di sekolah. Terdapat Rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis pada siswa biasanya terjadi disebabkan karena pada saat proses dilakukannya suatu pembelajaran dalam sehari-hari dinilai kurang cukup efektif dalam mengembangkan sebuah minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri para siswa.

Sebagai upaya menjalankan pasal 31 UUD 1945, pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan pendidikan melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan

---

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam perjalanannya pembangunan sistem pendidikan nasional tidak pernah lepas dari warna sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkupinya. Dari perspektif sistem pendidikan nasional tersebut, kita mengenal sistem pendidikan nasional versi orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai 2013 sekarang ini atau sudah lebih dari 50 tahun, Indonesia sudah melaksanakan sistem pendidikan nasional, namun dampaknya belum signifikan dalam pembangunan Indonesia. Ignatius G. Saksono (2010). Merinci beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pendidikan antara masalah kelangsungan hidup bangsa, budaya korupsi, ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan, konsumerisme dan budaya materialistik, kerusakan lingkungan hidup, bahaya narkoba, merosotnya mutu hasil pendidikan formal, dan maraknya komersialisasi pendidikan.

Sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan perjalanan sejarah negara ini. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara. Namun, dalam pembahasan ini, kita akan menyoroti beberapa aspek penting dalam sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, tata kelola pendidikan di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah-sekolah, guru, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan pendidikan, pembuatan kurikulum nasional, dan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Pemerintah daerah juga memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sekolah-sekolah, sebagai unit pelaksana pendidikan, memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan kurikulum dan memastikan kualitas pengajaran. Guru, sebagai ujung tombak sistem pendidikan, berperan dalam proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua siswa, juga penting dalam mendukung pendidikan. (Zamhari:2023).

## SIMPULAN

Perbandingan antara sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda dan pendidikan di Indonesia saat ini menunjukkan adanya transformasi fundamental dari model yang diskriminatif dan berorientasi pada kepentingan kolonial menuju sistem yang lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Pendidikan kolonial cenderung memperkuat stratifikasi sosial dengan akses terbatas, sementara pendidikan Indonesia modern berusaha mewujudkan asas pemerataan melalui kebijakan wajib belajar, kurikulum nasional, serta peningkatan mutu pembelajaran. Namun, tantangan berupa kesenjangan kualitas, rendahnya literasi, serta relevansi pendidikan terhadap kebutuhan global masih perlu dibenahi. Oleh itu, refleksi historis terhadap warisan kolonial menjadi penting untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional yang adaptif, berkeadilan, dan mampu mencetak generasi yang kompetitif di tingkat global.

---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abbas, S. (2007). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Arifin, A. (1995). *Ilmu Perbandingan Pendidikan*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Federspiel, H. M. (2021). *Indonesian Education: Colonial Roots and Contemporary Challenges*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003158496>
- Kawakib, A. M. (2009). *Pesantren and Globalization*. Malang: UIN Malang Press.
- Nasution, S. (1994). *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- OECD. (2019). *Education Policy Outlook: Indonesia*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2b8fddee-en>
- Prijanto, S. (2010). *Raden Arya Prabangkara*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Publishing Group.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2020). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Analisis dan Kritik*. Jakarta: Grasindo.
- Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316673716>
- UNESCO. (2022). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- Zambari, et al. (2023). Perkembangan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 1(5), 77–85.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zhao, Y. (2021). *Learners Without Borders: New Learning Pathways for All Students*. Thousand Oaks, CA: Corwin.